

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI



Oleh :

ERVINDA SRI NINGSIH
2008/ 05350

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN
(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tanah Datar)

Nama : Ervinda Sri Ningsih
NIM/BP : 05350/2008
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

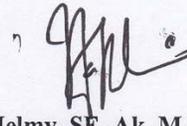
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tanah Datar)

Nama : Ervinda Sri Ningsih

NIM/BP : 05350/2008

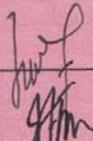
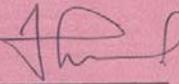
Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak	2. 
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Vita Fitria Sari, SE, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ervinda Sri Ningsih
NIM/BP : 05350/2008
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 28 Januari 1990
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Hamka no 244, Air Tawar Timur, Padang
No. Hp/Telpon : 085274772555
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2014

Yang menyatakan,



Ervinda Sri Ningsih
Nim. 2008/05350

ABSTRAK

Ervinda Sri Ningsih (2008/05350). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Tanah Datar).

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

II : Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : 1) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi LKPD, 2) Pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas informasi LKPD, serta 3) Pengaruh SDM terhadap kualitas LKPD. Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kab Tanah Datar. Pemilihan sampel dengan metode total sampling, dengan jumlah responden 76. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing Kepala, Kasubbag dan Staf Bagian Akuntansi pada setiap SKPD. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi LKPD dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $0,449 > 0,306$. Nilai koefisien β pada variabel X1 bernilai positif yang berarti (H1 diterima). 2) Pemanfaatan TI berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi LKPD dimana nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $0,408 > 0,306$. Nilai koefisien β pada variabel X2 bernilai positif yang berarti (H2 diterima). 3) SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi LKPD dimana nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $0,378 > 0,306$. Nilai koefisien β pada variabel X3 bernilai positif yang berarti (H3 diterima). Dalam penelitian ini disarankan: 1) Dari hasil penelitian ini, disarankan bagi seluruh SKPD Kab Tanah Datar agar dapat meningkatkan sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan TI, serta SDM untuk mencapai LKPD yang berkualitas, 2) Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan metode wawancara langsung dengan responden, sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya, 3) Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan judul yang sama sebaiknya menambahkan dan menggunakan variabel lain.

Kata Kunci: SPI, Pemanfaatan TI, SDM, Kualitas Informasi LKPD

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris SKPD Di Kabupaten Tanah Datar)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Akselaku pembimbing I dan Ibu Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak dan Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si, selaku penelaah dan penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Pegawai perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Kepada kedua orang tua teristimewa, Ibunda tercinta Nurdianti. N. SE, Ayahanda tercinta Ermanto Kakak tersayang Sev Mulya Gusti, ST dan Erick Noer Siswanto, Om cik, Om yus, Mak dang, Mami, Tante Tina, Rizki Ananta Putri, SE, Ardhi, SE yang selalu mensupport dan yang telah memberikan perhatian, semangat, do'a, dorongan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
7. Para sahabat terbaik "Jalessa" (Dina Sari Putri, SE, Siti Gizca Regiana, SE, Hafiza Rahma Juwita, SE, Nur Astuti, Fadhillah Husna, SE), Pacar tacinto, Fitria, Citra Putri Fajar Hati, Spd, dan Poppy Veone Helsya, SE, Ibu Jun dan Papa Jub yang selalu memberikan semangat dan do'a bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kualitas Informasi.....	12
1. Laporan Keuangan.....	14
a. Pengertian Laporan Keuangan	14
b. Tujuan Laporan Keuangan	15
c. Komponen Laporan Keuangan.....	16
d. Laporan Keuangan Pemerintah	16
e. Dasar Hukum Laporan Keuangan	17
2. Sistem Pengendalian Intern	18
a. Pengertian Pengendalian Intern	18
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern.....	19
c. Unsur Sistem Pengendalian Intern	19
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	23
a. Definisi Pemanfaatan Teknologi Informasi	23
b. Fungsi Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	24
4. Sumber Daya Manusia	26
a. Pengertian Sumber Daya Manusia.....	26
b. Komponen Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	30

5. Penelitian Terdahulu.....	32
B. Pengembangan Hipotesis.....	34
C. Kerangka Konseptual	38
D. Hipotesis	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Variabel Penelitian.....	45
F. Pengukuran Variabel.....	45
G. Instrumen Penelitian	47
H. Uji Instrumen	49
I. Uji Asumsi Klasik.....	51
J. Teknik Analisis Data	54
K. Definisi Operasional	59
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Karakteristik Responden.....	62
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	65
D. Statistik Deskriptif.....	73
E. Uji Asumsi Klasik.....	73
F. Hasil Penelitian.....	77
G. Pembahasan	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan Penelitian.....	87
C. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Skor Jawaban untuk Setiap Pertanyaan.....	56
2. Instrumen Penelitian	56
3. Hasil Uji Validitas Item Kuesioner <i>Pilot Test</i>	58
4. Hasil Uji Reliabilitas Item Kuesioner <i>Pilot Test</i>	59
5. Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	71
6. Responden Berdasarkan Umur Perusahaan	72
7. Responden Berdasarkan Jenis Usaha	73
8. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
9. Responden Berdasarkan Umur Responden.....	74
10. Responden Berdasarkan Agama	74
11. Responden Berdasarkan Suku.....	75
12. Responden Berdasarkan Pengurusan SPT	76
13. Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib pajak Badan	77
14. Distribusi Frekuensi Pengetahuan Pajak.....	78
15. Distribusi Frekuensi Pemeriksaan Pajak.....	79
16. Distribusi Frekuensi Tarif Pajak	80
17. Hasil Uji Normalitas Residual	81
18. Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
19. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	83
20. Hasil Uji F Statistik.....	83
21. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	84
22. Hasil Uji Regresi Berganda.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Penelitian dan Kuesioner Penelitian
2. Uji Validitas dan Reliabilitas *Pilot Test*
3. Hasil TCR
4. Uji Asumsi Klasik
5. Uji Hipotesis
6. Surat Izin Penelitian Fakultas Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa informasi laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. *Governmental Accounting Standards Board* (GASB, 1999) dalam *Concepts Statement No.1* menyatakan tentang tujuan laporan keuangan yaitu merupakan dasar pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan

menurut PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai kualitas (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kualitas informasi laporan keuangan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Safrida (2010), salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Indriasari (2008) kualitas informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

Sistem pengendalian intern merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan serta memelihara sistem pengendalian intern (SPI) yang memadai secara berkelanjutan, sehingga

dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, kualitas laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku (Amien, 2010). Pengendalian internal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan laporan keuangan, (b) efisiensi dan efektifitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006, sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. SPI akan membantu memandu entitas berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Faktor yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Dedi (2007), menyatakan bahwa kemudahan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap manfaat yang dirasakan. Pemerintah kota Palembang merasakan manfaat penggunaan teknologi informasi dalam memberikan

pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, karena pada umumnya teknologi informasi sudah terbukti dapat memberikan kemudahan dalam membantu kegiatan di sektor publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan multiprocessing tetapi pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal (Wahana Komputer, 2003).

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutar akhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Faktor lainnya yang memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah adalah sumber daya manusia. Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang juga berkualitas dalam upaya peningkatan SDM. Menurut Harifan (2009) sumber daya

manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan informasi laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Pengendalian mengenai sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintah pernah dilakukan. Penelitian Harifan (2009) menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kabupaten Tanah Datar diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun

kualifikasinya. Jumlah pegawai staf akuntansi masih kurang dan sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, padahal fungsi dan proses akuntansi hanya dapat dilaksanakan oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dibidang akuntansi.

Indikator sederhana yang dapat kita pakai untuk menilai apakah suatu laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas adalah opini yang diperoleh oleh laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Terkait dengan masalah opini laporan keuangan, Ketua BPK RI Hadi Poernomo (Metrojambi, 2012) saat penyampaian Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong sangat rendah. BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 34 LKPD 7 persen, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 341 LKPD 66 persen, opini tidak wajar (TW) 5 persen atas 26 LKPD tahun 2011, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 115 LKPD 22 persen. Walaupun persentase yang memperoleh opini WTP dan WDP sedikit meningkat dari tahun 2010 namun hal ini masih sangat jauh dari harapan. Dan juga sempat menyinggung penyebab hal itu bisa terjadi adalah karena ketidakefisienan penggunaan anggaran, penyimpangan administrasi dan masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (LHP LKPD) Tahun 2013. BPK menemukan dua masalah dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2013, sehingga lembaga ini memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WDP DPP) terhadap LKPD tersebut. Dengan adanya beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya: 1) Belum konsisten dalam menerapkan kebijakan akuntansi terkait penyusutan aset tetap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kinerja Majelis TP/TGR harus lebih ditingkatkan dalam menangani masalah-masalah Kerugian Daerah (KERUDA) di Pemkab Tanah Datar. Atas adanya paragraf penjelasan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Pemkab Tanah Datar untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku agar Pemkab Tanah Datar dapat meningkatkan Opini yang diperolehnya tahun depan menjadi WTP murni, (www.Haluan.co.id).

Opini itu jelas tidak lebih baik dari penilaian BPK atas LKPD Tahun 2012 yang memberikan WTP murni. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterpahaman atau dapat dipahami. Mengingat keterpahaman merupakan unsur kualitas informasi yang penting terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian internal organisasi (Mahmudi, 2007).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliarti (2008), menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) membuktikan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008), bahwa yang sumber daya manusia di Kabupaten Ogan Hilir tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif. Penelitian yang dilakukan oleh safrida (2010) pengaruh pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Alasan penulis melakukan penelitian ini untuk menguji kembali apakah dengan menggunakan teori yang sama dengan responden dan lokasi yang berbeda akan menghasilkan penelitian yang sama sehingga memperkuat teori yang ada dan dapat digeneralisasikan. Alasan lain melakukan penelitian ini karena pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil riset tentang kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah.

Adanya perbedaan hasil penelitian yang diperoleh tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Sehingga, penelitian ini diberi judul” **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten Tanah Datar)**”. Penelitian ini akan dilakukan pada satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Hal ini terkait dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang mendapat opini yang berbeda setiap tahunnya dari tahun anggaran 2008.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten Tanah Datar.
2. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten tanah datar.
3. Sejauhmana pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten tanah datar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.
3. Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. diharapkan dapat lebih memahami pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

3. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kualitas Informasi

Dalam PP Nomor 24 tahun 2005, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan, apakah informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi yang relevan.

2) Memiliki manfaat umpan balik (*Feedback Value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu

a) Memiliki manfaat prediktif (*Predictive Value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

c) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi dapat dicegah.

d) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005, tentang SAP laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan pemerintah No 8 tahun 2006, tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-peride sebelumnya. Namun demikian perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politikserta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

“Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

c. Komponen Laporan Keuangan

Dalam PP No 8 tahun 2006 laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang di perbandingkan dengan anggarannya dan dengan realisasi periode sebelumnya.

2) Neraca

Menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan arus kas

Menyajikan arus kas dari aktifitas operasi, arus kas dari aktifitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktifitas pembiayaan, dan arus kas dari aktifitas non anggaran yang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4) Catatan atas laporan keuangan

Menyajikan pengungkapan penjelasan yang tidak dimuat pada laporan diatas, seperti metode penyusutan, metode yang dipakai, dan lainnya.

d. Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Suwardjono (2004:101) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan

ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan laporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

e. Dasar Hukum Laporan Keuangan

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2006, sistem pengendalian intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 60 tahun 2008, pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya :

- a. Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara
- b. Keandalan Laporan Keuangan
- c. Pengamanan aset negara
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 SPIP terdiri atas unsur, lima komponen pengendalian internal:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;

- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. identifikasi risiko; dan
2. analisis risiko

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan

c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3) Aktifitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian umum; dan

b. pengendalian aplikasi.

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pengamanan sistem informasi

b. pengendalian atas akses

c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;

d. pengendalian atas perangkat lunak sistem

- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a.pengendalian otorisasi;
- b.pengendalian kelengkapan;
- c.pengendalian akurasi; dan
- d.pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

4) Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5) Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Definisi pemanfaatan teknologi informasi

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus diutamakan. Sebagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Hamzah, 2009 dalam Celviana dan Rahmawati, 2010).

Menurut model yang dikembangkan Thompson et al. (1991) dalam Tjhai (2003:5) yang mengadopsi sebagian teori yang diusulkan oleh Trandis (1980), dalam Astuti dan I ketut (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Faktor sosial
2. Affect (perasaan individu)
3. Kesesuaian tugas

4. Konsekuensi jangka panjang
5. Kondisi yang memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi
6. Kompleksitas

b. Fungsi pemanfaatan teknologi informasi

Adapun fungsi pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Salah satu saat ini yang memanfaatkan teknologi informasi adalah SKPD. Penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting, untuk menerapkan teknologi informasi haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut. Apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, sehingga dalam penerapan IT dibutuhkan orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi bagi sebuah perusahaan ataupun SKPD dapat kita lihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry, ada 5 peranan mendasar pemanfaatan teknologi informasi di sebuah perusahaan, yaitu:

1. Fungsi Operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan

menjalankan fungsinya sebagai supporting agency dimana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah firm infrastructure.

2. Fungsi Monitoring and Control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait.
3. Fungsi Planning and Decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan dan/atau pengembangan korporat karena fungsi strategis tersebut di atas.
4. Fungsi Communication secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastructure dalam era organisasi moderen dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi.

5. Fungsi Interorganisational merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Konsep kemitraan strategis atau partnerships berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi Supply Chain Management atau Enterprise Resource Planning membuat perusahaan melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi unit teknologi informasinya.

5. Sumber Daya Manusia

a. Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang harus dilihat dalam suatu instansi. Untuk meningkatkan sumber daya manusia maka harus diadakan pembinaan. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien.

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan

dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan informasi laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Menurut Galuh (2012) sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu

elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimana dan apapun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman, komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai. Lebih lanjut Thoha (2001) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu wadah untuk mencapai tujuan dan manusialah yang akan membawa organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya.

Pergeseran paradigma dalam konsep kecakapan menjadi kompetensi telah menimbulkan strategis yang sangat positif bagi upaya meningkatkan kualitas SDM. Covey, Roger dan Rebacca Merrill (1994) dalam Sedarmayanti (2004:61) menyatakan bahwa kompetensi mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Kompetensi teknis: pengetahuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang telah disepakati, kemampuan untuk memikirkan persoalan dan mencari alternatif baru.
- 2) Kompetensi konseptual: kemampuan melihat gambar besar, untuk menguji berbagai pengandaian dan mengubah perspektif.

- 3) Kompetensi untuk melihat ketergantungan : kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, termasuk kemampuan berkomunikasi, mendapat alternatif lain, kemampuan untuk melihat dan beroperasi secara efektif secara organisasi.

Dengan demikian kompetensi merupakan faktor mendasar yang perlu dimiliki oleh seseorang sehingga mempunyai kemampuan rata-rata atau biasa. Sedarmayanti (2004:62) mengatakan bahwa kompetensi mempunyai cakupan yang jauh lebih komprehensif, yang terdiri dari:

- a) Motif, kebutuhan dasar seseorang yang mengarahkan cara berfikir dan bersikap.
- b) Sifat dasar, menentukan cara seseorang bertindak atau bertingkah laku.
- c) Citra pribadi, pandangan seseorang terhadap identitas dan kepribadiannya sendiri.
- d) Peran kemasyarakatan, bagaimana seseorang melihat dari interaksinya dengan orang lain
- e) Pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan dalam tugas atau pekerjaan tertentu.
- f) Keterampilan, kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu dengan baik.

b. Komponen Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*), untuk melaksanakan suatu pekerjaan (hevesi, 2003 dalam indriasari, 2008). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti

pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dan standar yang ditetapkan pemerintah daerah.

Ukuran kapasitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman (*Griffin, 2004*) yaitu:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun didunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk membudayakan manusia itu sendiri. Pendidikan dapat dibagi menjadi: a) Pendidikan Formal, b) Pendidikan Informal, dan c) Pendidikan non formal.

2) Pelatihan

Menurut Rivai (2005), pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan dapat mengajarkan

keahlian yang diperlukan baik untuk pekerjaan saat ini maupun masa mendatang. Menurut kendall (2003) dalam wahyuni (2011), ada beberapa indikator pelatihan yaitu:

- a) Menetapkan sasaran yang jelas dan terukur
- b) Menggunakan metode pelatihan yang tepat
- c) Mempersiapkan materi pelatihan yang mudah dipahami
- d) Pelatihan memberikan keuntungan
- e) Pelatihan diberikan oleh tenaga ahli
- f) Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai
- g) Materi pelatihan disiapkan dengan baik

3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan memiliki pengalaman seseorang akan terbiasa melakukan sesuatu pekerjaan, lebih terampil, punya wawasan yang luas dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Pengalaman tidak hanya diukur dari tingkat pendidikannya saja, pengalaman juga memberikan kontribusi yang cukup terhadap kemampuan seseorang dalam menangani sebuah pekerjaan. Menurut Dessler (2003, 135-136), pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Tausikal (2007) menguji pengaruh pemahaman

sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Maluku Tengah. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan parsial variabel independen ber-pengaruh terhadap kinerja SKPD Penelitian yang dilakukan Indriasari (2008) menguji pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan SPI terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil pemanfaatan TI dan SPI berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas SDM tidak memiliki pengaruh.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zuliarti (2008), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Harifan (2009), Pengaruh Kapasitas Sumber Daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan informasi teknologi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dhany (2010) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern

akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Galuh (2012) tentang pengaruh pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI, dan pengawasan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil variabel eksogen dan intervening berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013) tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif. Pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif .

B. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa variabel yang diduga dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan sumber daya manusia. Berikut akan diulas secara ringkas beberapa hubungan tiga variabel tersebut dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1. Hubungan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Salah satu yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern (Galuh, 2012). Tidak disangkal lagi bahwa sistem pengendalian intern dapat digunakan untuk menunjang kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370).

Penelitian Putri (2010) tentang sistem pengendalian intern pada SKPD pemerintah kota Padang bahwa sistem pengendalian intern untuk menghasilkan suatu kualitas laporan keuangan masih belum memadai.

Jadi sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan memiliki hubungan yang positif karena sistem pengendalian intern yang baik merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan.

H₁: Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan. Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan

teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Penelitian *Donnelly et al.*, (1994) dalam Desi dan Ertambang (2008) menemukan bahwa sistem/teknologi informasi yang dimiliki pemerintah daerah di Skotlandia belum begitu baik. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

3. Hubungan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Kualitas informasi laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sumber daya manusia yang ada di dalamnya (galuh, 2012). Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Harifan (2009) menemukan bukti empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia di subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada di Kota Padang diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Jumlah pegawai staf akuntansi masih kurang dan sebagian besar pegawai subbagian akuntansi atau tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan (Warisno, 2008). Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan kualitas informasi laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga penulis mengajukan hipotesis:

H₃: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas informasi laporan keuangan (Y), sedangkan variabel independennya adalah sistem pengendalian intern (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan sumber daya manusia (X3).

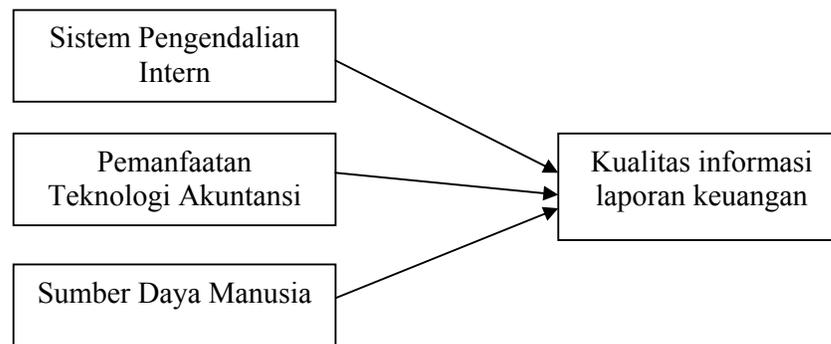
Kualitas informasi laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh suatu entitas. Bertujuan untuk laporan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Beberapa faktor diantaranya adalah sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia (Arens, 2008:370). Faktor-faktor ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada pemerintah.

Peneliti kali ini akan meneliti mengenai pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi dan sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Secara skematis gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar: 1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.
- H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.
- H₃ : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tanah datar.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tanah datar.
3. Sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten tanah datar.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sedikitnya kuesioner yang dapat diolah karena banyaknya SKPD yang menolak untuk mengembalikan kuesioner dengan alasan sedang sibuk atau tidak menerima penelitian sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua SKPD yang ada di kabupaten tanah datar.

2. Responden mengisi kuisisioner dipengaruhi oleh psikologi responden itu sendiri sehingga dalam pengisian kuisisioner mereka menjadi tidak teliti. Data penelitian dalam penelitian ini berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuisisioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara langsung. Namun apabila penelitian dilakukan melalui wawancara maka akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan responden yang diteliti banyak.

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, agar dapat memperluas sampel dan menambahkan variabel lain seperti pengawasan keuangan daerah, pemahaman akuntansi, dan peran internal audit, atau menjadikan variabel tersebut sebagai variabel pemoderasi maupun variabel intervening dalam penelitian yang akan dilakukan.
2. Penelitian ini masih terbatas pada sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, dan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh.

3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2003. Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu. Jakarta: Erlangga. 2008. Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jakarta: Erlangga
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Batang). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang, (Online), (<http://eprints.undip.ac.id/29808/1/Skripsi018.pdf>)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2013. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2012”. Melalui <http://www.bpk.go.id>
- Bastian, Indra (2006). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit Erlangg. (2006). Audit Sektor Publik. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat.
- Boynton, William. 2007. Modern Auditing. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta
- Celviana Widyaningrum, Rahmawati. 2010. Pengaruh SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten. Simposium Nasional Akuntansi XII Purwokerto.
- Dedi Rianto Rahardi.2007. Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan Sektor Publik. Seminar Nasional teknologi 2007.
- Dita Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, (<http://smartaccounting.files.wordpress.com>)
- Desi Indriasari, Ertambang Nahartyo. 2009. Pemgaruh kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Studi pada Pemerintah kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Akuntansi.

- Elim, John & Safral, Mohammad. 2009. Lingkungan Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian Intern; Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Pusdiklat BPKP.
- Fauziah Fauzian, Accounting Information System P.2 :2000)
- Galuh Fajar Dellano. 2012. Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan Pengawasan Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal SNA. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Harahap, Syofyan Syafri. 2007. Teori Akuntansi. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Krismiadi. 2002. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: AMP YKPN
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- La Midjan, dan Azhar Susanto. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi 1*, Edisi Keenam : Lembaga Informasi Akuntansi.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1.
- Mulyadi. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap akuntabilitas Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis. Padang. MM UNP
- Nugroho Widjajanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti : Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui <http://www.google.com>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. melalui <http://www.google.com>

_____, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com>

_____, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui <http://www.google.com>

_____, Nomor 25 Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com>

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Penge-lolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com>

Singleton, Hall.2007. Informatin Technology Auditing and Assurance. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Steven A. Moscove, accounting Information System P.6 :1981

Suwardjono. 2004. Teori Akuntansi. Yogyakarta: PBF

Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com>

_____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com>

Wahyuni, Asnita. 2011. Pengaruh Penggunaan TI, Keahlian Pemakai dan Keterlibatan Pemakai terhadap Efektifitas Penerapan SIA. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Widjajanto, Nugroho. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Erlangga Sektor Publik

- Winidyaningrum. 2010. Pengaruh SDM dan Pemanfaatan TI Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. Jurnal SNA. STIE ST. Pignatelli: Surakarta
- Yosefrinaldi. 2013. Pengaruh Kapasitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jurnal SNA. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Zetra, Aidinil. 2009. Strategi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah. Skripsi. Melalui <http://www.bpk.go.id/web/files/2009/07/270609-aidinil-zetra.pdf>
- Zuliarti. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Muria Kudus: Kudus

www.Haluan.co.id

www.Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.bpk.go.id

Padang, Juli 2014

Kepada Yth:
Bapak/Ibu Responden
di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuisisioner ini. Semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat, Amin. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Negeri Padang. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut:

Nama : Ervinda Sri Ningsih
Nim/BP : 05350/2008

Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun, kelancaran penelitian ini sangat bergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi melalui kuisisioner (terlampir) dengan skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Tanah Datar). Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban pada kuisisioner yang terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda ceklis (√) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Pihak Penerima

Hormat saya,

Ervinda Sri Ningsih

KUISIONER

A. Identitas Responden

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin : perempuan laki - laki
4. Nama SKPD :
5. Jabatan :

Kuisisioner latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

1. Jenjang pendidikan formal yang Bapak/ibu tempuh:
 - a. S2
 - b. S1
 - c. D3
 - d. D1
 - e. SLTA
2. Bidang keahlian (Pendidikan) Bapak/Ibu yang telah ditempuh:
 - a. Akuntansi
 - b. Manajemen
 - c. teknik
 - d. hukum
 - e. Ilmu lainnya (.....)
3. berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai kepala bagian/staf akuntansi di SKPD ini:
 - a. > 5 tahun
 - b. 4 tahun
 - c. 3 tahun
 - d. 2 tahun
 - e. < 2 tahun

B. DAFTAR PERNYATAAN

Mohon Bapak/Ibu membaca dengan teliti pernyataan yang ada dibawah ini, kemudian memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

RR = Ragu-Ragu

1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pertanyaan	SS	S	RR	TS	STS
1.	Laporan keuangan yang disusun SKPD dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.					
2.	SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Lapora Keuangan).					
3.	SKPD telah mampu menyelesaikan laporan keuangan (LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keangan) tepat waktu.					
4.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD telah menggambarkan dengan jujur transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
5.	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					
6.	Apabila informasi dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.					
7.	Informasi yang termuat didalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
8.	Laporan keuangan yang disusun oleh SKPD telah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.					
9.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material.					

10.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan SKPD belum memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					
-----	--	--	--	--	--	--

2. Sistem Pengendalian Internal

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	SKPD mempunyai kode etik pegawai instansi pemerintah secara tertulis.					
2	Pimpinan SKPD telah memberikan contoh dalam berperilaku patuh terhadap peraturan.					
3	Struktur organisasi SKPD telah menggambarkan pembagian kewenangan .					
4	Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian internal, SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian internal.					
5	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid.					
6	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otoritas dari pihak yang berwenang.					
7	Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD					
8	SKPD telah mencatat transaksi keuangan pada buku jurnal (seperti jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal aset lainnya, dan jurnal selain kas) pada setiap transaksi keuangan terjadi.					
9	SKPD tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya.					
10	Dalam waktu yang tidak ditentukan Pimpinan SKPD melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.					

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Sub bagian keuangan/akuntansi memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas					
2	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja					
3	Jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan					
4	Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi					
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
6	Laporan akuntansi di hasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi					
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur					
8	Peralatan yang usang/rusak tidak di data tepat pada waktunya					

4. Sumber Daya Manusia

	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
1	Minimal staf sub bagian keuangan / akuntansi merupakan lulusan D3 Akuntansi.					
2	Pegawai yang ahli di bidangnya ditempatkan pada pekerjaan yang tepat.					
3	Pegawai dengan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang lebih baik bagi instansi.					
4	Menggunakan metode pelatihan yang tepat.					
5	Materi pelatihan yang diberikan mudah dipahami oleh pegawai.					
6	Materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pemakai.					
7	Pengalaman dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi pekerjaan.					
8	Pegawai yang mempunyai prestasi kerja sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk menempatkannya pada sebuah pekerjaan.					
9	Pengalaman yang lama dalam suatu bidang dapat mengurangi kesalahan.					

TCR

No	Item	Skor										N	Skor Total	Rata-Rata	TCR
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	Y1	40	52,63	36	47,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	344	4,53	90,53
2	Y2	48	63,16	28	36,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	352	4,63	92,63
3	Y3	44	57,89	32	42,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	348	4,58	91,58
4	Y4	31	40,79	45	59,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	335	4,41	88,16
5	Y5	30	39,47	41	53,95	5	6,58	0	0,00	0	0,00	76	329	4,33	86,58
6	Y6	25	32,89	46	60,53	5	6,58	0	0,00	0	0,00	76	324	4,26	85,26
7	Y7	34	44,74	42	55,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	338	4,45	88,95
8	Y8	35	46,05	41	53,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	339	4,46	89,21
9	Y9	4	5,263	71	93,42	1	1,32		0,00		0,00	76	307	4,04	80,79
10	Y10	0	0	0	0	8	10,53	61	80,26	7	9,21	76	153	2,01	40,26
jumlah		291	382,9	382	502,6	19	25	61	80,3	7	9,211	760	3169		
Rata-rata														4,17	83,39

No	Item	Skor										N	Skor Total	Rata-Rata	TCR
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	X1.1	34	44,74	42	55,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	338	4,45	88,95
2	X1.2	31	40,79	44	57,89	1	1,32	0	0,00	0	0,00	76	334	4,39	87,89
3	X1.3	35	46,05	41	53,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	339	4,46	89,21
4	X1.4	37	48,68	36	47,37	3	3,95	0	0,00	0	0,00	76	338	4,45	88,95
5	X1.5	45	59,21	31	40,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	349	4,59	91,84
6	X1.6	41	53,95	29	38,16	6	7,89	0	0,00	0	0,00	76	339	4,46	89,21
7	X1.7	20	26,32	45	59,21	10	13,16	1	1,32	0	0,00	76	312	4,11	82,11
8	X1.8	31	40,79	45	59,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	335	4,41	88,16
9	X1.9	0	0	1	1,32	12	15,79	50	65,79	13	17,11	76	153	2,01	40,26
10	X1.10	19	25	48	63,16	9	11,84		0,00		0,00	76	314	4,13	82,63
jumlah		293	385,5	362	476,3	41	53,947	51	67,1	13	17,11	760	3151		
Rata-rata														4,15	82,92

No	Item	Skor										N	Skor Total	Rata-Rata	TCR
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	X2.1	37	48,68	39	51,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	341	4,49	89,74
2	X2.2	29	38,16	47	61,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	333	4,38	87,63
3	X2.3	25	32,89	48	63,16	0	0,00	3	3,95	0	0,00	76	323	4,25	85,00
4	X2.4	27	35,53	49	64,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	331	4,36	87,11
5	X2.5	9	11,84	67	88,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	313	4,12	82,37
6	X2.6	25	32,89	51	67,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	329	4,33	86,58
7	X2.7	29	38,16	47	61,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	333	4,38	87,63
8	X2.8	0	0	55	72,37	5	6,58	16	21,05	0	0,00	76	267	3,51	70,26
jumlah		181	238,2	403	530,3	5	6,5789	19	25	0	0	608	2570		
Rata-rata														4,23	84,54

No	Item	Skor										N	Skor Total	Rata-Rata	TCR
		5	%	4	%	3	%	2	%	1	%				
1	X3.1	24	31,58	36	47,37	11	14,47	5	6,58	0	0,00	76	307	4,04	80,79
2	X3.2	21	27,63	55	72,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	325	4,28	85,53
3	X3.3	31	40,79	45	59,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	335	4,41	88,16
4	X3.4	38	50	38	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	342	4,50	90,00
5	X3.5	17	22,37	59	77,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	321	4,22	84,47
6	X3.6	42	55,26	34	44,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	346	4,55	91,05
7	X3.7	38	50	38	50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	342	4,50	90,00
8	X3.8	31	40,79	43	56,58	0	0,00	2	2,63	0	0,00	76	331	4,36	87,11
9	X3.9	23	30,26	53	69,74	0	0,00	0	0,00	0	0,00	76	327	4,30	86,05
	jumlah	265	348,7	401	527,6	11	14,474	7	9,21	0	0	684	2976		
	Rata-rata													4,35	87,02

1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.845	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	37.10	17.197	.639	.824
VAR00002	37.03	16.309	.593	.826
VAR00003	37.00	15.862	.613	.824
VAR00004	37.17	15.592	.622	.823
VAR00005	36.87	18.878	.378	.844
VAR00006	37.03	17.482	.523	.833
VAR00007	37.00	18.483	.487	.837
VAR00008	37.00	17.724	.587	.829
VAR00009	37.00	17.655	.469	.837
VAR00010	37.30	14.769	.625	.826

2. Sistem Pengendalian Intern

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.855	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	34.23	25.978	.556	.842
VAR00002	33.87	26.395	.584	.841
VAR00003	34.40	26.041	.494	.847
VAR00004	33.97	27.964	.366	.856
VAR00005	34.03	25.137	.708	.831
VAR00006	33.77	26.323	.493	.847
VAR00007	33.87	27.085	.435	.851
VAR00008	34.53	23.016	.683	.830
VAR00009	33.93	24.616	.584	.840
VAR00010	34.50	21.362	.732	.826

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.907	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	29.37	7.895	.652	.900
VAR00002	29.67	7.540	.821	.886
VAR00003	29.67	7.540	.821	.886
VAR00004	29.73	8.340	.534	.909
VAR00005	29.70	7.597	.824	.886
VAR00006	29.57	7.426	.819	.885
VAR00007	29.70	8.493	.449	.915
VAR00008	30.60	6.800	.760	.894

4. Sumber Daya Manusia (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.885	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	34.63	10.861	.476	.903
VAR00002	34.20	11.338	.894	.854
VAR00003	34.20	12.510	.513	.881
VAR00004	34.20	11.338	.894	.854
VAR00005	34.20	11.338	.894	.854
VAR00006	34.30	10.493	.875	.849
VAR00007	34.03	12.792	.408	.888
VAR00008	34.40	11.766	.475	.889
VAR00009	34.37	12.378	.694	.871

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
	N	76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97979590
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.073
	Kolmogorov-Smirnov Z	.648
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.796

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Pengendalian Intern	.706	1.417
Sistem Informasi Akuntansi	.755	1.325
Sumber Daya Manusia	.855	1.169

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Uji Heterokedastisitas

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.478	2.336		.205	.838
	SPI	-.018	.046	-.053	-.381	.705
	PTI	.015	.064	.032	.236	.814
	SDM	.023	.048	.060	.471	.639

a. Dependent Variable: ABS

Uji Hipotesis

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.748 ^a	.559	.541	1.39972

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	178.976	3	59.659	30.450	.000 ^a
	Residual	141.063	72	1.959		
	Total	320.039	75			

a. Predictors: (Constant), Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern

b. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.53	4.459		.343	.732
Sistem Pengendalian Intern	.425	.088	.450	4.832	.000
Sistem Informasi Akuntansi	.340	.123	.249	2.762	.007
Sumber Daya Manusia	.283	.093	.258	3.053	.003

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089
Fax. (0751) 447366, e-mail info@fe.unp.ac.id

nomor : 3340/UN35.1.7/PP/2014
tipe : -
sifat : Penelitian

2 Mei 2014

kepada : Yth. Kepala Kesbangpol dan Linmas
Jl. MT Haryono
Batusangkar

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan Skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : **Ervinda Sri Ningsih**
BP/NIM : 2008/05350
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akt. Sektor Publik

bermaksud akan melakukan Penelitian pada Instansi yang Bapak/Ibu :

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN, SISTEM
AKUNTANSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Lama Penelitian : 1 Bulan

Sehubungan dengan itu mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama, kami sampaikan terima kasih.

Dekan
Dekan I,
Drs, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005